



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD BAPELITBANG

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab, II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Fungsi Penunjang bidang Perencanaan, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan Bapelitbang yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan Bapelitbang Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2018.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 70);
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 64);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 65);
33. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 36).



C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2018 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan LRA
 2. Belanja
- B. Neraca
 1. Aset
 2. Kewajiban
 3. Ekuitas
- C. Laporan Operasional
 1. Pendapatan LO
 2. Beban
 3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
- D. Laporan Perubahan Ekuitas
 1. Ekuitas Awal
 2. Surplus / Defisit LO
 3. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bapelitbang Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi Fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAH
BERDASARKAN KLASIFIKASI FUNGSI PENUNJANG

NO. REK	URUSAN/FUNGSI PENUNJANG	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SALDO	
				(Rp)	(%)
1	Perencanaan	9.481.163.443	8.867.635.303	613.528.140	93,53
2					

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada BApelitbang Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

Belanja tidak terserap sebesar 6.47% disebabkan karena :

1. Terdapat belanja material yang harganya lebih rendah dari harga yang direncanakan pada DPA;
2. Terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAPELITBANG

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja .

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pada Bapelitbang tidak terdapat penerimaan rekening umum pada kas daerah, sehingga akun pendapatan pada LRA Bapelitbang adalah nihil.

2. Belanja LRA

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja Bapelitbang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	9.396.163.443,00	8.784.868.793,00	611.294.650,00	93,49
2	BELANJA MODAL	85.000.000,00	82.766.510,00	2.233.490,00	97,37
	JUMLAH	9.481.163.443,00	8.867.635.303,00	613.528.140,00	

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2018 lebih rendah Rp 611.294.650,00 atau 93,53%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 maka realisasi belanja tahun 2018 turun sebesar Rp 1.179.578.990,00.atau 11,84 %. Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2018		2017	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	9.396.163.443,00	8.784.868.793,00	9.964.447.783,00	(11,84)
2	Belanja Modal	85.000.000,00	82.766.510,00	305.805.500,00	(72,93)
	JUMLAH	9.481.163.443,00	8.867.635.303,00	10.270.253.283,00	(42,39)



Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

1) BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi Bapelitbang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi:			
Belanja Pegawai	4.717.296.043,00	4.455.858.418,00	5.168.582.825,00
Belanja Barang	4.678.867.400,00	4.329.010.375,00	4.795.864.958,00
	9.396.163.443,00	8.784.868.793,00	9.964.447.783,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2018 lebih rendah Rp 611.294.650,00 atau 93,49 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, realisasi belanja operasi Tahun 2018 lebih kecil Rp1.179.578.990,00 atau turun sebesar 11,9%.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Tidak Langsung:					
Gaji dan Tunjangan	2.228.844.070,00	2.161.564.908,00	96,98	(67.279.162,00)	(3,02)
Tambahan Penghasilan PNS	1.149.071.973,00	1.008.444.222,00	87,76	(140.627.751,00)	(12,24)
	3.377.916.043,00	3.170.009.130,00	93,85	(207.906.913,00)	(6,15)
Belanja Langsung:					
Honorarium PNS	1.019.300.000,00	996.200.000,00	97,73	(23.100.000,00)	(2,27)
Honorarium Non PNS	255.900.000,00	243.000.000,00	94,96	(12.900.000,00)	(5,04)
Uang Lembur	64.180.000,00	46.649.288,00	72,69	(17.530.712,00)	(27,31)
Belanja pegawai BLUD	1.339.380.000,00	1.285.849.288,00	96,00	(53.530.712,00)	(4,00)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp1.285.849.288,00 (96%) dengan sisa anggaran sebesar Rp53.530.712,00 (4%). Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 3.170.009.130,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah. Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp 1.285.849.288,00,



diantaranya dalam bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim dan honorarium tenaga ahli.

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja sebagai berikut :
(REALISASI YANG KURANG DARI 80%)

1) Belanja Langsung.

- a) Uang lembur tidak terserap sebesar Rp 46.649.288,00 dikarenakan jumlah pegawai melaksanakan lembur lebih sedikit dari yang ditargetkan.

b) Belanja Barang

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

<i>Belanja Barang:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	247.452.500,00	223.961.552,00	90,51	(23.490.948,00)	(9,49)
Belanja Bahan/Material	27.875.000,00	20.000.000,00	71,75	(7.875.000,00)	(28,25)
Belanja Jasa Kantor	399.025.000,00	366.426.627,00	91,83	(32.598.373,00)	(8,17)
Belanja Premi Asuransi	-	-	-	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	64.799.470,00	99,69	(200.530,00)	(0,31)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	211.514.400,00	211.214.400,00	99,86	(300.000,00)	(0,14)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00	-	-
Belanja Makan Minum	582.895.000,00	408.693.000,00	70,11	(174.202.000,00)	(29,89)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	8.000.000,00	7.920.000,00	99,00	(80.000,00)	(1,00)
Belanja Perjalanan Dinas	1.284.305.500,00	1.192.865.826,00	92,88	(91.439.674,00)	(7,12)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	192.000.000,00	191.636.000,00	99,81	(364.000,00)	(0,19)
Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	34.487.000,00	98,53	(513.000,00)	(1,47)
Belanja Jasa konsultasi	875.350.000,00	866.056.500,00	98,94	(9.293.500,00)	(1,06)
Belanja Survey dan Penyusunan Design Engineering	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa Dana JKN	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-	-
Uang untuk diberikan kpd masy/pihak ketiga	-	-	-	-	-
	74.200.000,00	74.200.000,00			
Belanja jasa narasumber /instruktur/tenaga ahli/pembicara	656.000.000,00	646.500.000,00	98,55	(9.500.000,00)	(1,45)
Jumlah	4.678.867.400,00	4.329.010.375,00	92,52	(349.857.025,00)	(7,48)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp4.329.010.375,00 atau 92,52% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp 349.857.025,00 atau 7,48%.

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja barang sebagai berikut **(REALISASI YANG KURANG DARI 80%)**

- a) Belanja bahan/material tidak terserap sebesar Rp 7.875.000,00 dikarenakan harga material (tas bintek) per buahnya lebih rendah dari harga yang ditargetkan pada dokumen penganggaran.



- b) Belanja makan dan minum tidak terserap sebesar Rp 174.202.000,00 dikarenakan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi makanan dan minuman kegiatan Musrenbangwil Bakorwil III yang semula direncanakan pada tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Batang, tetapi pelkasanaannya ditunda pada tahun 2019.

2) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

<i>Belanja Modal:</i>	Tahun 2018		Tahun 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	82.766.510,00	167.563.500,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	138.242.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	85.000.000,00	82.766.510,00	305.805.500,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2018 lebih rendah yaitu Rp 82.766.510,00 atau 97,37%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi belanja modal Tahun 2018 lebih kecil yaitu Rp 82.766.510,00 atau turun sebesar 73% dibandingkan realisasi belanja modal tahun 2017.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap .

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Modal Pengadaan Tanah				-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin :				-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat berat	-	-	-	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan alat-alat bengkel	-	-	-	-	-
Belanja Modal pengadaan alat pertanian dan peternakan	-	-	-	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat kantot rumah tangga	73.000.000	70.796.510	96,98	2.203.490	3,02
Belanja Modal pengadaan alat-alat studio	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan alat-alat komunikasi	3.000.000	2.970.000	99,00	30.000	1,00
Belanja Modal Pengadaan alat-alat ukur	-	-	-	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat kedokteran	-	-	-	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat laboratorium	9.000.000	9.000.000	100,00	-	-
Belanja Modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan	-	-	-	-	-
	85.000.000	82.766.510	97,37	2.233.490	2,63
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan					
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:					
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan					
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan					
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air					
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota					
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan					
				-	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:					
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan					
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan					
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan					
Belanja Modal Aset Lainnya					
Jumlah Belanja Modal	85.000.000	82.766.510	97,37	2.233.490	2,63

Berikut kami sampaikan penjelasan realisasi belanja modal yaitu Belanja Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut:(**REALISASI YANG KURANG DARI 80%**)

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

Belanja Modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp 82.766.510,00 atau 97,37 % yang berarti belanja modal peralatan dan mesin terealisasi lebih dari 80%.

B. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun



masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD Bapelitbang terbagi dalam :

<i>Uraian</i>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
1. Aset Lancar	652.550,00	1.714.060,00
2. Investasi Jangka Panjang	-	
3. Aset Tetap	2.963.669.416,00	3.166.319.279,00
4. Aset Lainnya	46.267.200,00	47.987.600,00
	<u>3.010.589.166,00</u>	<u>3.216.020.939,00</u>

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di SKPD Bapelitbang yaitu sebesar Rp 205.431.773,00 atau 6,4%.

a. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Aset Lancar</i>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
1 Kas di Kasda	-	
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
3 Kas di Bendahara Penerimaan	-	
4 Kas di BLUD	-	
5 Kas Lainnya	-	
6 Piutang Pajak Daerah	-	
7 Piutang Retribusi	-	
8 Penyisihan Piutang tak tertagih	-	
9 Belanja Dibayar Dimuka	-	
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	
13 Piutang Lainnya	-	
12 Persediaan	652.550,00	1.714.060,00
	<u>652.550,00</u>	<u>1.714.060,00</u>

1) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 di SKPD Bapelitbang adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis	585.050,00	1.649.060,00
2 Persediaan Obat-obatan medis	-	-
3 Persediaan Obat-obatan ternak	-	-
4 Persediaan Rumah tangga	-	-
5 Persediaan Benda Berharga	67.500,00	65.000,00
6 Persediaan Lainnya	-	-
	<u>652.550,00</u>	<u>1.714.060,00</u>

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang SKPD Bapelitbang.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

a) Persediaan alat tulis kantor

Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2018 sebesar Rp585.050,00 dengan perincian terlampir.

b) Persediaan benda berharga.

Persediaan benda berharga per 31 Desember 2018 sebesar Rp67.500,00 dengan perincian terlampir

b. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada SKPD Bapelitbang berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp5.855.309.202,00 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah				-
Peralatan dan Mesin	2.829.949.880,00	82.766.510,00	-	2.912.716.390,00
Gedung dan Bangunan	2.412.295.000,00	-	-	2.412.295.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.953.600,00	-	-	61.953.600,00
Aset tetap lainnya	416.936.212,00	-	-	416.936.212,00
Aset lainnya	51.408.000,00	-	-	51.408.000,00
	<u>5.772.542.692,00</u>	<u>82.766.510,00</u>	-	<u>5.855.309.202,00</u>

Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset merupakan penambahan aset dari belanja modal. Sedangkan untuk pengurangan nilai aset, pada SKPD Bapelitbang tidak terdapat pengurangan aset untuk tahun 2018.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Penambahan aset tetap

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:



<i>Uraian</i>	<u>Realisasi Belanja Modal 2018 (Rp)</u>
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	82.766.510,00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>82.766.510,00</u>

1) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.912.716.390,00 naik sebesar Rp82.766.510,00 atau 0,1% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2017 sebesar Rp2.829.949.880,00

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:

<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2018</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2017</i>	<i>Naik (turun)</i>
Alat-alat besar	3.133.611,00	3.133.611,00	-
Alat -alat angkutan	1.215.246.654,00	1.215.246.654,00	-
alat-alat bengkel dan alat ukur	21.759.444,00	21.759.444,00	-
alat-alat pertanian dan peternakan	-	-	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	1.553.317.021,00	1.482.520.511,00	70.796.510,00
alat-alat studio dan komunikasi	83.251.049,00	80.281.049,00	2.970.000,00
alat-alat kedokteran	-	-	-
alat-alat laboratorium	23.350.000,00	14.350.000,00	9.000.000,00
alat-alat keamanan	12.658.611,00	12.658.611,00	-
	<u>2.912.716.390,00</u>	<u>2.829.949.880,00</u>	<u>82.766.510,00</u>

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2018 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

a) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp 82.766.510,00 hanya terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp 82.766.510,00

2) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca SKPD Bapelitbang per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.412.295.000,00 sama dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2017.



3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 61.953.600,00 sama dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2017.

<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	neraca per 31 Des 2018	neraca per 31 Des 2017	Naik (turun)
Jalan dan Jembatan	-	-	-
Bangunan air	18.820.000,00	18.820.000,00	-
Instalasi	-	-	-
Jaringan	43.133.600,00	43.133.600,00	-
	61.953.600,00	61.953.600,00	-

4) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca SKPD Bapelitbang per 31 Desember 2018 sebesar Rp.416.936.212,00 naik sebesar sama dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2017 .

Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

<i>Aset Tetap Lainnya</i>	neraca per 31 Des 2018	neraca per 31 Des 2017	Naik (turun)
Buku dan Kepustakaan	416.936.212,00	416.936.212,00	-
Barang Bercorak Seni			
Kebudayaan	-	-	-
Hewan, ternak dan			
Tumbuhan	-	-	-
	416.936.212,00	416.936.212,00	-

2) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2018 dan perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2017 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2017 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.840.231.786,00)	(2.554.815.413,00)	(285.416.373,00)
	(2.840.231.786,00)	(2.554.815.413,00)	(285.416.373,00)



c. ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

SKPD	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2017	Naik (turun)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
Aset tak Berwujud	51.408.000,00	51.408.000,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset lain-lain	-	-	-
	51.408.000,00	51.408.000,00	-

1) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud SKPD Bapelitbang per 31 Desember 2018 senilai Rp51.408.000,00 berupa Perangkat Lunak Sistem Operasi yaitu aplikasi Sim RTLH dan e Planning.

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp5.140.800,00) pada tahun 2018 dan (Rp2.570.400,00) pada tahun 2017terinci sbb:

Jenis Barang	Nilai	Thn Perolehan	Akumulasi Amortisasi 2017	Beban Amortisasi 2018	Akumulasi Amortisasi 2018
Perangkat Lunak Sistem Operasi	51.408.000,00	2017	(2.570.400,00)	(2.570.400,00)	(5.140.800,00)
					-
					-
					-
					-
	51.408.000,00		(2.570.400,00)	(2.570.400,00)	(5.140.800,00)

2. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2018, kewajiban SKPD Bapelitbang terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

<i>Uraian</i>	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2017	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	84.577.852,00	97.989.778,00	(13.411.926,00)
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	84.577.852,00	97.989.778,00	(13.411.926,00)

a. Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek SKPD Bapelitbang Tahun 2018 terdiri dari:

<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Hutang Bunga	-	-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan di terima dimuka	-	-
Hutang Belanja	84.577.852,00	97.989.778,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	84.577.852,00	97.989.778,00

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

1) Hutang Belanja.

Meliputi Utang listrik, telpon, air dan internet serta Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2018 yang baru dibayar bulan Januari 2019 sebesar Rp84.577.852,00

3. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD Bapelitbang sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Ekuitas	2.926.011.314,00	3.118.031.161,00
	2.926.011.314,00	3.118.031.161,00

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya



mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. SKPD Bapelitbang tidak terdapat pendapatan LO.

2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2018, beban SKPD. Bapelitbang adalah sebesar Rp 9.060.505.150,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp10.294.818.985,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.234.313.835,00 atau 11,99%. Berikut realisasi beban 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 :

<i>Beban</i>	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	3.204.835.293,00	3.383.315.200,00	(178.479.907,00)	94,72
Beban Persediaan	246.023.062,00	207.811.463,00	38.211.599,00	(118,39)
Beban Jasa	3.955.307.726,00	5.114.992.458,00	(1.159.684.732,00)	77,33
Beban Pemeliharaan	99.286.470,00	87.442.260,00	11.844.210,00	113,55
Beban Perjalanan Dinas	1.192.865.826,00	1.198.478.331,00	(5.612.505,00)	99,53
Beban Penyusutan	287.986.773,00	240.279.273,00	47.707.500,00	119,86
Beban Hibah	74.200.000,00	62.500.000,00	11.700.000,00	118,72
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa	-	-	-	-
	<u>9.060.505.150,00</u>	<u>10.294.818.985,00</u>	<u>(1.234.313.835,00)</u>	<u>88,01</u>

a. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Bapelitbang Kabupaten Batang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.204.835.293,00 apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp3.383.315.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp178.479.907,00 atau turun sebesar 5,3%.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :



Beban Pegawai	Nominal (Rp)
Gaji dan Tunjangan PNS	2.161.564.908,00
Tambahan Penghasilan PNS	996.621.097,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD Serta KDH/WKDH	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Uang Lembur	46.649.288,00
Belanja Pegawai BLUD	
	<u>3.204.835.293,00</u>

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 246.023.062,00 sedangkan pada tahun 2017 beban persediaan adalah sebesar Rp 207,811.463,00 sehingga berkurang / bertambah sebesar Rp38.211.599,00 atau 18.39%. Beban Persediaan terdiri dari :

Beban Persediaan	Nominal (Rp)
Bahan Pakai Habis	225.023.062,00
Bahan Material	20.000.000,00
Cetak dan Penggandaan	
Jasa Konsultasi	
Belanja brg dan jasa yg diserahkan ke masy	1.000.000,00
	<u>246.023.062,00</u>

c. Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp3.955.307.726,00 sedangkan pada tahun 2017 beban jasa adalah sebesar Rp 5.114.992.458,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp1.159.684.732,00 atau turun 22,7%.

Beban Jasa terdiri dari :



Jasa Kantor	366.426.627,00
Premi Asuransi	-
Cetak dan Penggandaan	211.214.400,00
Sewa	19.250.000,00
Makan Minum	408.693.000,00
Pakaian dinas	7.920.000,00
Belanja Kursus dan Sosialisasi	191.636.000,00
Jasa Konsultasi	866.056.500,00
Survey dan Penyusunan Design	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	
Belanja JKN	
Uang yang diberikan ke masyarakat	
Belanja Jasa Narasumber	646.500.000,00
Belanja Telp, listrik air dan internet 2018	4.801.102,00
Belanja Telp, listrik air dan internet 2017	(6.389.903,00)
	<u>3.955.307.726,00</u>

d. Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp99.286.470,00 sedangkan pada tahun 2017 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp 87.442.260,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp11.844.210,00 atau naik sebesar 13,5%.

Beban pemeliharaan tahun 2018 terdiri dari :

Beban Pemeliharaan	Nominal (Rp)
Perawatan Kendaraan bermotor	<u>64.799.470,00</u>
Pemeliharaan gedung, dll	<u>34.487.000,00</u>
	<u>99.286.470,00</u>

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.192.865.826,00 sedangkan pada tahun 2017 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp 1.198.478.331,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp5.612.505,00 atau turun sebesar 0,5%.



Beban Perjalanan Dinas	Nominal (Rp)
Belanja kursus, pelatihan dan sosialisasi	-
Pakaian Dinas	-
Perjalanan Dinas	1.192.865.826,00
	<u>1.192.865.826,00</u>

f. Beban Hibah

Beban hibah adalah beban dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 74.200.000,00 sedangkan pada tahun 2017 beban hibah adalah sebesar Rp 62.500.000,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 11.700.000,00 atau naik sebesar 18,7%

Beban hibah terdiri dari :

Beban Hibah	Nominal (Rp)
Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat	74.200.000,00
Uang yang diberikan ke masyarakat	-
belanja hibah	-
Hibah aset Disperindag	-
Hibah Aset Dinas Kesehatan	-
Hibah Aset Dinas Kelautan	-
Hibah Dana BOS	-
Hibah Block Grant	-
	<u>74.200.000,00</u>

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 287.986.773,00 sedangkan pada tahun 2017 beban penyusutan adalah sebesar Rp 240.279.273,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 47.707.500,00 atau naik sebesar 19,86%.

3. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2018, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp 0 dan realisasi beban Rp 9.060.505.150,00 maka SKPD Bapelitbang mengalami defisit sebesar Rp 9.060.505.150,00. Apabila dibandingkan dengan defisit tahun 2017 sebesar Rp 10.294.818.985,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 1.234.313.835,00 atau turun sebesar 11,99%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	-	-	-	-
Beban	9.060.505.150,00	10.294.818.985,00	(1.234.313.835,00)	88,01
Jumlah	(9.060.505.150,00)	(10.294.818.985,00)	1.234.313.835,00	88,01



D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal SKPD Bapelitbang Tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.118.031.161,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2017.

2. Surplus/Defisit –LO

Defisit-LO SKPD Bapelitbang Tahun 2018 adalah sebesar Rp 9.060.505.150,00 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2018 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2018.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp 8.868.485.303,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018 (Rp)
1 Surplus/Defisit LRA	8.867.635.303,00
2 Pengurangan aset tetap	
3 Perhitungan akumulasi penyusutan AT yang dihapuskan	
4 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke SKPD lain	
5 Perhitungan akumulasi penyusutan AT dari SKPD SKPD lain	
6 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke Aset Lainnya	
7 Perhitungan hutang Retensi	
8 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	
9 Perhitungan hutang jangka pendek lainnya	
10 Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	850.000,00
	<u>8.868.485.303,00</u>

Berikut penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2018 sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit LRA

a) Defisit LRA Bapelitbang sebesar Rp 8.867.635.303,00 (dijelaskan diatas)

b. Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Koreksi amortisasi aset tak berwujud tahun 2018 sebesar Rp 850.000,00 merupakan koreksi atas akumulasi amortisasi pada tahun 2017 yang seharusnya Rp 2.570.400,00 tetapi dicatat di neraca sebesar Rp 3.420.400,00.

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Bapelitbang Kabupaten Batang Tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.926.011.314,00 .dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2017 sebesar Rp 3.188.031161,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp192.019.847,00 atau turun sebesar 6,16%.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA

Bapelitbang tidak melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Bapelitbang dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2018 pada SKPD Bapelitbang. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Bapelitbang Tahun 2018. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, Januari 2019

**Kepala Bapelitbang
Kabupaten Batang**

ARI YUDIANTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199003 1 005